

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- A'an effendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena pers, Makassar.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama. Bandung
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Suparno, 1992, *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa* PT Purel Mundial, Jakarta.
- Moh. Mahfud, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Marsono, 1974, *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta,
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nainggolan, 1987 *Pembinaan Pegawai Negeri Sipi 1*, Jakarta, PT Pertja
- Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- P. A. F. Lamintang. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soesilo, 1995, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harapan, 2018, *Hukum Kepegawaian* UII Press, Yogyakarta.
- Rocky Marbun, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.

Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal:

Kunkun Abdul Syukur, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal-Unigal, Vol 3, Nomor 2, 2015.

Kadarsyah, "Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal-De Facto Vol. 1, No. 1, 2014.

Ida Zuraida, "Quo Vadis: Penegakan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana", Sependikum, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5943)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718)

Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343)

Skripsi:

Ahmad Fadil Dwiansyah, 2019, "*Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap Status Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ricky Risnanda Surbakti, 2021. "*Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Kantor Pemerintah Kota Medan)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

WEBSITE:

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/> diakses pada 21 Januari 2021.

<https://hukumexpert.com/hak-dan-kewajiban-aparatur-sipil-negara/?detail=ulasan> diakses pada 30 Januari 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> Diakses pada 7 Februari 2022

<https://kbbi.web.id/aniaya> Diakses Pada 7 Februari 2022

<https://kbbi.web.id/sanksi> diakses pada 7 Februari 2022

Putusan:

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Wtp